



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, Rabu, 24 April 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

BMKG Juanda Sebut Cuaca Ekstrem sampai Awal Mei

SIDOARJO - Cuaca ekstrem berpotensi menghantui Kota Delta pada akhir April hingga awal Mei mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memperingatkan Sidoarjo dan beberapa kota-kabupaten lain yang kemungkinan terdampak bencana akibat cuaca ekstrem.



GELAP: Awan hitam menghiasi Kota Delta kemarin. BMKG Juanda memperingatkan, cuaca ekstrem masih akan menerpa kawasan Sidoarjo hingga Mei.

Saat dikonfirmasi kemarin (23/4), Ketua Tim Meteorologi BMKG Juanda Shanas Prayuda mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem tersebut diperkirakan mengakibatkan tingginya intensitas hujan.

Menurut Shanas, persoalannya masih sama, yaitu adanya fenomena gelombang Rossby dan MJO di laut Jawa Timur. "Suhunya panas sehingga mempercepat penguapan dan pembuatan awan yang gelap," jelasnya.

Potensi cuaca ekstrem bisa menimbulkan beberapa fenomena seperti angin puting beluh hingga hujan es. "Potensi bencana seperti intensitas tinggi," tuturnya.

BMKG Juanda juga sudah menyurati BPBD Sidoarjo dan Jawa Timur terkait adanya potensi bencana dalam periode cuaca ini ada antisipasi dari masyarakat jika terjadi cuaca ekstrem," jelasnya.

Tentunya, salah satu hal kecil seperti membersihkan selokan dan sungai bisa dilakukan dengan (DBD). Cuaca dan suhu yang mudah berubah drastis itu menurut pengamatan BMKG Juanda disebabkan kondisi saat ini yang masuk musim pancaroba.

Setelah Revitalisasi, PKL Muncul Lagi

SIDOARJO - Trotoar di depan dan samping Gelora Delta yang terlihat rapi setelah direvitalisasi kini mulai berhias lapak pedagang kaki lima (PKL). Padahal, sejak awal mereka tidak boleh lagi berjualan di kawasan tersebut. Kemarin (23/4), misalnya, PKL tampak berjualan di sisi barat trotoar.

Sebagian besar PKL, seperti yang berada di dekat bundaran Taman Pinang Indah (TPI), sudah pindah. Namun, ada sebagian PKL di sisi utara yang serahkan ke satpol PP untuk sterilisasinya," ujar Hery. Sebab, mereka sudah direlokasi ke tempat lain maupun ke kompleks Gelora Delta. "Sudah disiapkan disporapar (dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata)," jelasnya.



Ketua JCW dan PAKSI : Diduga Ada Jual Beli Jabatan dan Kejanggalan

SIDOARJO - Menyikapi mutasi 495 ASN Pemkab Sidoarjo yang sudah dilantik dan akhirnya dibatalkan menyebabkan kegalangan dikalangan ASN. Atas Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan ASN tanggal 22 Maret 2024 lalu sudah dikeluarkan. Dikeluarkannya SK pembatalan itu tidak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024.



Dua pentolan LSM di Sidoarjo angkat bicara terkait kegalangan mutasi dan pembatalannya. Dalam SE Mendagri tersebut disebutkan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah diarahkan melakukan penggantian pejabat kecuai mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Usman Siap Maju Jadi Calon Bupati Sidoarjo

KOTA - Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengaku siap maju menjadi Calon Bupati Sidoarjo di Pilkada serentak 2024. Hal tersebut dia sampaikan langsung selepas rapat paripurna di DPRD Sidoarjo.

Karena itu, Usman yang juga politisi PKB tersebut sedang melakukan pendekatan kepada terdapat elite partai. Agar mendapatkan rekam untuk maju menjadi calon Bupati.

"Saya siap maju sebagai calon bupati, sudah siap-siap dan pendekatan kepada elite-elite partai agar nanti mendapatkan kepercayaan dalam bentuk rekam," ucapnya.

Usman menyebut DPP PKB telah menyinali. Jika seseorang yang dilantik sebagai kepala orang nomor satu di Kota Delta adalah, itu yang menunjukkan ketidakstabilan tinggi.

"Siapa saja? Ada Pak Subandi (Wabup Sidoarjo saat ini, Red), ada saja, mungkin ada juga yang lainnya, itu lah yang akan mendapatkan rekomendasi," jelasnya.

Hearing Dengan Komisi A DPRD Sekda Akui Kesalahan Sudah Bikin Gaduh Mutasi ASN

SIDOARJO - Mutasi ASN Pemkab Sidoarjo yang sudah dilantik dan akhirnya dibatalkan menyebabkan kegalangan dikalangan ASN. Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan ASN tanggal 22 Maret 2024 lalu sudah dikeluarkan. Dikeluarkannya SK pembatalan itu tidak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024.



Dalam SE Mendagri tersebut disebutkan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat kecuai mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Komis A DPRD Sidoarjo mengundang Sekda Sidoarjo Penny Apringdewati serta Kepala BRD Sidoarjo Budi Basuki serta Asisten Administrasi Umum Atok Irawan dan Kabag Organisasi Anif Mulyo untuk membahas solusi pembatalan pelantikan pejabat tersebut dalam hearing (dengar pendapat). Ketua KPU Sidoarjo serta Ketua Bawas Sidoarjo juga diundang oleh Komisi A DPRD Sidoarjo. Selain itu tenaga ahli hukum tata Negara Dr. Rusdianto Susung SH, MH juga ikut dihadirkan.

Sekda, Dhamroni Chudiori serta hampir semua anggotanya yang hadir di forum tersebut. "Angan berhalah dengan bermacam alasan yang dibuat-buat seperti itu. Cukup minta maaf dan kita akan cari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," ujar legislator PKB itu.

Kepergian Komisi A itu muncul setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Budi Basuki berkilah pilakannya tidak pernah menerima Surat Edaran Mendagri Fenny. Selain itu Sekda juga mengakui adanya kegalangan diantara pejabat yang terlanjur dilantik itu. "Ada yang sudah potong kembang tapi pelantikannya malah dibatalkan," imbuhnya. Dhamroni pun langsung be-reaksi usai mendengar pertanyaan itu. Menurut dia yang seharusnya dipikir oleh Sekda dan Kepala BKD saat ini adalah jabatannya kewajiban Pemkab Sidoarjo di depan publik. Juga kemahnya kontrol administrasi yang terjadi di internal pihak eksekutif sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi yang pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan. "Mestinya itu yang dipikir, ngak usah ngurus potong kembang segala," tegas Dhamroni. Bukan hanya itu, Dhamroni juga menyoroti penempatan personel dalam pelantikan itu yang dianggapnya tak memenuhi azas right man in the right place. "Masa ada TU sekolah yang senengnya ngajar paduan suara dipindah jadi

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Gaduh Soal Pembatalan Mutasi Jabatan, FA Akhirnya Minta Maaf

Sidoarjo, Pojok Kiri

Munculnya surat keputusan pembatalan mutasi 495 pejabat Pemkab Sidoarjo hingga dua kali yang menimbulkan kegaduhan di lingkungan ASN, membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati akhirnya minta maaf di depan komisi A DPRD Sidoarjo.

DPRD Sidoarjo.

Fenny Apridawati (FA) saat bersama H.Haris komisi A. "Saya memang tidak terlalu tahu soal hukum. Jadi saya minta maaf," ucapnya dengan nada bergetar di tengah forum Rapat Dengar Pendapat atau hearing dengan Komisi A di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (22/4/2024).

Pernyataan itu disampaikan Sekda Fenny usai dicecar pertanyaan dan pernyataan keras yang diungkap Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudlori serta hampir semua anggotanya yang hadir di forum tersebut.

"Jangan berkilah dengan bermacam alasan yang dibuat-buat seperti itu. Cukup minta maaf dan kita akan cari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," ujar legislator PKB itu.

Kemarahan Ketua Komisi A itu muncul setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Budi Basuki berkilah pihaknya tidak pernah menerima Surat Edaran Mendagri yang menentukan batas akhir pelantikan pejabat daerah jelang Pilkada itu.

Apalagi keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Fenny, Dhamroni pun langsung bereaksi usai mendengar pertanyaan itu.

Menurutnya yang seharusnya dipikir oleh Sekda dan Kepala BKD saat ini adalah jatuhnya kewibawaan Pemkab Sidoarjo di depan publik.

Juga lemahnya kontrol administrasi yang terjadi di internal pihak eksekutif sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi yang pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan.

Bukan hanya itu Dhamroni juga menyoroti penempatan personel dalam pelantikan itu yang dianggapnya tak memenuhi azas *right man in the right place*.

"Masa ada TU sekolah yang senengnya ngajar paduan suara dipindah jadi kasie pelayanan di Kelurahan? Sebenarnya cara kerjanya BKD itu gimana sih?," sindir politisi asal Tulangan itu.

Akhir dari forum ini adalah kesepakatan antara

pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama datang ke kantor Kemendagri, guna melakukan konsultasi lebih lanjut terkait masalah ini sesuai saran dari tim ahli Rusdianto Sesung agar mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

PEMKAB GANDENG KOMISI A DPRD SEGERA KONSULTASI KE KEMENDAGRI TERKAIT PEMBATALAN PELANTIKAN ASN

Sidoarjo, Pojok Kiri

Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan ASN tanggal 22 Maret 2024 lalu sudah dikeluarkan. Dikeluarkannya SK pembatalan itu tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 100.2.13.1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024. Dalam SE Kemendagri tersebut disebutkan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Pemkab Sidoarjo melakukan pelantikan tanggal 22 Maret 2024 setelah berkonsultasi merupakan batas akhir bagi kepala daerah dapat melakukan mutasi jabatan. Pasalnya sebelumnya Pemkab Sidoarjo sudah berkonsultasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) mengenai UU Nomor 10 Tahun 2016, mengenai batasan waktu kepala daerah dapat melakukan penggantian pejabat sesuai dengan UU Pilkada. Hasilnya KASN memperbolehkan pelantikan pejabat oleh bupati Sidoarjo tanggal 22 Maret 2024 lalu. Bahkan pelantikan tersebut dihadiri oleh pihak KASN serta Kepala Kantor Regional BKN yang kemarin dilakukan di Pendopo Delta Wibawa.

Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah berupaya mencari solusi terkait pembatalan pelantikan pejabat yang tidak hanya dialami Kabupaten Sidoarjo saja. Terdapat 30 daerah yang mengalami persoalan serupa. Kepala daerah di puluhan kabupaten kota itu juga melakukan pelantikan di tanggal 22 Maret 2024. Dalam waktu dekat ini persoalan pembatalan pelantikan pejabat Sidoarjo akan dibawa ke Kemendagri. Pemkab Sidoarjo gandeng Komisi A DPRD Sidoarjo akan segera berkonsultasi ke Kemendagri.

Siang tadi, Senin, (22/4),



Komisi A DPRD Sidoarjo mengundang Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala BKD Sidoarjo Budi Basuki serta Asisten Administrasi Umum Atok Irawan dan Kabag Organisasi Arif Mulyono untuk membahas solusi pembatalan pelantikan pejabat tersebut. Ketua KPU Sidoarjo serta Ketua Bawaslu Sidoarjo juga diundang oleh Komisi A DPRD Sidoarjo. Selain itu tenaga ahli hukum tata Negara Dr. Rusdianto Sesung SH, MH juga ikut hadir.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman yang hadir meminta persoalan tersebut segera dikonsultasikan ke Kemendagri. Pasalnya SK pembatalan tersebut terdapat batas akhir berlakunya pembatalan pelantikan tanggal 30 April 2024.

"Saya minta Komisi A dengan bu Sekda dengan jajarannya bersama-sama ke Kemendagri dan hasil dari Kemendagri itu kita patuhi bersama, kita sepakati sekarang hari Senin, kita paling telat Kamis sudah harus ke Kemendagri karena tanggal 30 ini batas akhir pembatalan," pintanya.

Dalam kesempatan itu Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati memohon maaf atas persoalan tersebut. Ia berjanji persoalan seperti ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo untuk terus berbenah.

"Saya memohon maaf atas kesalahan ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Sidoarjo untuk lebih baik lagi," ucap-

nya.

Sementara itu tenaga ahli hukum tata Negara Rusdianto Sesung mengatakan keputusan bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan secara hukum sah. Namun secara prosedur cacat. Pasalnya saat melakukan pelantikan tanpa ada surat persetujuan Kemendagri.

"Memang cacat tapi kadar kecacatannya bukan cacat wewenang karena kalau cacat wewenang itu ada didalam pasal 56 ayat 1, kalau dia cacat wewenang maka akibat hukumnya dia batal demi hukum, dia itu hanya mengandung cacat prosedur," ucapnya.

Oleh karenanya lanjut Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya itu, pejabat yang dilantik kemarin saat ini masih sah menduduki jabatannya. Namun setelah tanggal 30 April 2024 besok, 491 ASN yang kemarin dilantik kembali ke jabatan semula.

"Posisinya sekarang ini Bu Fenny masih Sekda, Pak Budi masih Kaban sampai tanggal 30 April kecuali jenengan menggugat ke PTUN bisa,"ujarnya.

Rusdianto juga memastikan secara hukum bahwa kebijakan pejabat yang kemarin dilantik juga sah secara hukum. Namun sekali lagi sampai tanggal 30 April sebagai batas akhir pembatalan pelantikan. Berbeda jika upaya meminta rekomendasi persetujuan pelantikan dari Kemendagri telah diperoleh. Maka ucap Rusdianto, SK bupati Sidoarjo tentang pem-

batalan pelantikan tersebut harus dicabut.

"Kalau ternyata rekomendasinya mengakui berarti tetap, berarti keputusan pembatalannya harus dicabut, kalau tidak disetujui berarti pembatalan ini berlaku, kembali ke awal semua, namun tindakannya tetap sah, misalnya saya sebelumnya bukan siapa-siapa lalu menjadi kepala bidang, lalu saya jadi PPK di bidang itu lalu saya tanda tangani kontrak, kontrak saya tetap sah sampai tanggal 30 tadi,"pungkasnya.

Sementara itu menurut Ahli Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya, Dr. Radian Salman, S.H., LL.M. menuturkan ada beberapa faktor yang mendasari pembatalan pengangkatan pegawai.

Faktor pertama, kata Radian, Pemkab Sidoarjo telah melakukan konsultasi dengan pihak KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) mengenai UU Nomor 10 Tahun 2016, mengenai Batasan waktu sesuai dengan UU Pilkada sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

"Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat pada tanggal 22 Maret 2024 sudah didahului peristiwa berupa pembuatan konsultasi kepada pihak yang berkompeten (KASN) sehingga hal ini secara objektif dapat dipandang sebagai Tindakan

kehati-hatian, kecermatan dan upaya kepastian hukum oleh Pemkab Sidoarjo," katanya saat ditemui pada Rapat Koordinasi Pengisian Jabatan yang dihadiri oleh 65 Perangkat Daerah Pemkab Sidoarjo di Ruang Delta Wicaksana, Senin (22/4).

Masih kata Radian, Pemkab Sidoarjo juga telah memedomani UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Bupati Sidoarjo memiliki wewenang dalam hal pembatalan pengangkatan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang di UU Nomor 30 Tahun 2014 dan mengacu pada Surat Edaran Kemendagri.

"Pada dasarnya menurut UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pembatalan dapat dilakukan karena adanya cacat wewenang, prosedur dan substansi (Pasal 66 ayat (1) huruf a). Bahwa terhadap terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri, dapat menjadi dasar substansi untuk melakukan pembatalan terhadap Keputusan yang telah ditetapkan dapat diubah, dicabut, atau ditunda oleh Badan atau Pejabat menetapkan Keputusan (Pasal 66 ayat (1) huruf b). Maka dalam hal ini pembatalan pengangkatan Pegawai telah sesuai dengan wewenang Bupati," jelasnya.

"Bahwa apabila Keputusan pembatalan dianggap tidak sah maka hal ini hanya bisa oleh karena alasan tidak berwenangnya pejabat atau badan terhadap suatu hal. Adapun mengenai alasan pemberian jangka waktu efektif berlaku, yang dikaitkan dengan diskresi dan AUPB, tidak bisa disimpulkan bertentangan kecuali diuji oleh pengadilan atau dibatalkan oleh badan atau pejabat atasan yang menetapkan Keputusan. Yang dilakukan Pemkab Sidoarjo tepat dalam me response surat Mendagri. Pegawai Pemkab yang dilantik tanggal 22 Maret tetap bekerja sesuai posisi dan wewenang sampai saat berlaku batas akhir sesuai SK Bupati," tambahnya. (Khol/ Fs)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



MULAI: DPC PDI Perjuangan Sidoarjo membuka pendaftaran untuk cabup dan cawabup.

DPC PDI Perjuangan Buka Pendaftaran Cabup-Cawabup untuk Pilkada

KOTA-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sidoarjo membuka pendaftaran untuk Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Pendaftaran dibuka bertepatan dengan Hari

Kartini, 21 April 2024.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sidoarjo Sumi Harsono menjelaskan, tema pendaftarannya adalah Sidoarjo Memanggil. Hal itu merupakan dorongan bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilkada Sidoarjo melalui PDI Perjuangan. Sumi menekankan pentingnya semangat juang

RA Kartini dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil di Kota Delta.

"Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor DPC PDI Perjuangan Sidoarjo dengan persyaratan dan kriteria yang telah disiapkan," ajak Sumi.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Sidoarjo

● Ke Halaman 10



DPC PDI Perjuangan...

Samsul Hadi menjelaskan jika pendaftaran terbuka untuk umum. Baik dari kader internal partai maupun luar partai.

"Kami membuka pendaftaran untuk umum baik kader atau eksternal seperti pengusaha birokrat, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat dan generasi muda," terangnya pada Radar Sidoarjo, Senin, 22 April 2024.

Samsul tak membatasi kader partai

yang ingin mengabdikan. Baginya semua yang ingin mengabdikan akan ia fasilitasi tanpa adanya syarat apapun. "Untuk kader internal kita membuka semua siapa yg ingin mengabdikan untuk masyarakat Sidoarjo," katanya.

Menurut dia, dalam penjurian tidak ada syarat batas usia. Yang penting usia masuk syarat dalam Perpu PKPU dalam Pilkada. "Kalau pengalaman tentu ada poin sendiri," imbuhnya.

Baginya, terdapat dua hal penting

dalam pendaftaran. Yakni langkah gerak dalam pesta demokrasi dan terbuka bagi yang ingin memajukan Kota Delta.

"Pertama, kami ingin menjadi langkah gerak terdepan dalam memulai pesta demokrasi pemilihan daerah serentak yang akan dimulai 27 November 2024. Kedua, kami membuka ruang bagi putra putri terbaik Kabupaten Sidoarjo yang memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan Kabupaten Sidoarjo di berbagai bidang," ujarnya. (sai/nis)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Usman Siap Maju Jadi Calon Bupati Sidoarjo

KOTA - Ketua DPRD Sidoarjo Usman mengaku siap maju menjadi Calon Bupati Sidoarjo di Pilkada serentak 2024. Hal tersebut dia sampaikan langsung selepas rapat paripurna di DPRD Sidoarjo.

Karena itu, Usman yang juga politisi PKB tersebut sedang melakukan pendekatan terhadap elite partai. Agar mendapatkan rekom untuk maju menjadi calon Bupati.

"Saya siap melaju sebagai calon bupati, sudah sosialisasi dan pendekatan kepada elite-elite partai agar nanti mendapatkan kepercayaan dalam bentuk rekom," ucapnya.

Usman menyebut DPP PKB telah memberi sinyal.

Jika seseorang yang dicalonkan sebagai bakal orang nomor satu di Kota Delta adalah ia yang mempunyai elektabilitas tinggi.

"Siapa saja? Ada Pak Subandi (Wabup Sidoarjo saat ini, Red), ada saya, mungkin ada juga yang lainnya, itu lah yang akan mendapatkan rekomendasi," jelasnya.

Menurut dia, siapapun yang direkomendasikan menjadi bupati, dia sepakat akan tegak lurus pada keputusan partai untuk saling mendukung dan memenangkan calon bupati yang direkomendasikan PKB.

Dia menerangkan jika DPP PKB saat ini sedang

● Ke Halaman 10



MAJU PILBUP: Ketua DPRD Sidoarjo yang juga politisi PKB, Usman saat ditemui selepas rapat paripurna.



Usman Siap Maju...

melakukan penjaringan bakal calon bupati Sidoarjo. Melalui administrasi maupun kepatutan serta kelayakan bakal calon.

Usman tak sabar DPP PKB mem-

buka pendaftaran sebagai bakal calon Bupati. Dia mengaku terus menunggu pembukaan pendaftaran.

"Itu yang saya tunggu-tunggu, kalau sudah dibuka, saya siap mendaftar, berkas administrasi sudah siap 100 persen," pungkasnya. (sai/nis)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Saluran air yang tersumbat dan kotor, di lingkungan pemukiman, bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti yang menimbulkan demam berdarah (DB). ali kusyanto/bhirawa

Demam Berdarah Renggut Satu Korban Jiwa di Kecamatan Waru

Sidoarjo, Bhirawa

Kecamatan Waru, sebagai kecamatan padat penduduk di Kabupaten Sidoarjo, mulai Januari -Maret 2024, menjadi wilayah yang banyak ditemukan kasus demam berdarah (DB).

Bahkan sampai update per 19 April 2024, juga tetap menjadi wilayah yang paling tinggi munculnya kasus DB nya.

Bila Bulan Januari -Maret, ditemukan ada 7 kasus, maka pada Bulan April sampai tanggal 19 April, ditemukan lagi ada 6 kasus.

Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, di Kecamatan Waru, sudah ada 1 pasien DB

yang meninggal dunia.

"Total sampai 19 April, kasus DB di Kabupaten Sidoarjo ada 113 kasus," komentar Plt Kadinkes Sidoarjo-dr M.Abdilah Asegaf, Selasa (23/4) kemarin:

Dirinya mengajak masyarakat di Sidoarjo untuk meningkatkan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) di lingkungan terdekat masing-masing.

Selain melakukan upaya 3 M, yakni menguras, menutup dan mengubur barang-barang yang berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk aedes aegypti.

Menurut dr Abdilah juga bisa den-

gan menanam tanaman yg dapat menangkal nyamuk, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, memasang kawat kasa, jendela dan ventilasi di rumah.

"Membasmi nyamuk aedes aegypti ini tak bisa sendiri, kita harus gotong royong bersama warga sekitar dalam membersihkan lingkungan," ujar Dirut RS Sidoarjo Barat itu.

Upaya-upaya lain dalam mengurangi perkebangbiakan nyamuk demam berdarah ini, lanjutnya bisa dengan meletakkan pakaian yang telah digunakan dalam wadah tertutup. Kemudian, bisa juga memberikan lavarsida pada penam-

pungan air yang susah untuk dikuras. Juga memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar.

Dirinya mengapresiasi sejumlah wilayah Puskesmas yang wilayahnya tidak sampai ada kasus DB selama Bulan Januari hingga Maret.

Seperti Puskesmas Balongbendo, Gedangan, Jabon, Prambon, Tarik2 dan Wonokasian.

Demikian juga pada Puskesmas, yang pada Bulan April ini masih nol kasus DB. Seperti Gedangan, Kedungsolo, Kepadangan, Krian, Prambon, Krembung, Ganting, Urangagung dan Wonoayu. [kus.gat]

HARIAN
Bhirawa

BMKG Juanda Sebut Cuaca Ekstrem sampai Awal Mei

SIDOARJO - Cuaca ekstrem berpotensi menghantui Kota Delta pada akhir April hingga awal Mei mendatang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memperingatkan Sidoarjo dan beberapa kota-kabupaten lain yang kemungkinan terdampak bencana akibat cuaca ekstrem.

Saat dikonfirmasi kemarin (23/4), Ketua Tim Meteorologi BMKG Juanda Shanas Prayuda mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem tersebut diperkirakan mengakibatkan tingginya intensitas hujan.

Menurut Shanas, persoalannya masih sama, yaitu adanya fenomena gelombang Rossby dan MJO di laut Jawa Timur. "Suhunya panas sehingga mempercepat penguapan dan pembuatan awan yang gelap," jelasnya.

Potensi cuaca ekstrem bisa menimbulkan beberapa fenomena seperti angin puting beliung hingga hujan es. "Potensi bencana seperti banjir juga sangat mungkin terjadi karena bakal ada hujan



GELAP: Awan hitam menghiasi Kota Delta kemarin. BMKG Juanda memperingatkan, cuaca ekstrem masih akan menerpa kawasan Sidoarjo hingga Mei. DITE SURENDRA/JAWAPOS

intensitas tinggi," tuturnya.

BMKG Juanda juga sudah menyurati BPBD Sidoarjo dan Jawa Timur terkait adanya potensi bencana dalam periode cuaca ekstrem hingga akhir Mei ini. "Diharapkan, dengan

ini ada antisipasi dari masyarakat jika terjadi cuaca ekstrem," jelasnya.

Tentunya, salah satu hal kecil seperti membersihkan selokan dan sungai bisa dilakukan untuk mencegah banjir dan bahaya demam berdarah

dengue (DBD). Cuaca dan suhu yang mudah berubah drastis itu menurut pengamatan BMKG Juanda disebabkan kondisi saat ini yang masuk musim pancaroba.

"Wajar ada hal tersebut, masyarakat mungkin bisa

mengantisipasi secara kesehatan dengan mengonsumsi vitamin," imbuhnya. BMKG Juanda memperkirakan bahwa musim kemarau masuk ke Sidoarjo sekitar Juli hingga Agustus. (eza/c7/any)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DELTASIANA

Kaget Ada Biawak di Pohon, Warga Panggil Damkar

SIDOARJO - Seekor biawak sepanjang 1 meter membuat geger warga Dusun Besuk, Desa Sambungrejo, Sukodono, Senin (22/3) pagi. Pasalnya, biawak dengan berat hampir 20 kilogram itu nangkring di pohon di halaman salah seorang warga. "Karena mungkin warga kaget, kok ada biawak di atas pohon dan takut menyerang, akhirnya lapor ke sini," ujar Humas Damkar BPBD Sidoarjo Yoli.

Abidzar, pelapor yang saat itu tengah merenovasi rumah, melihat biawak tersebut ketika duduk istirahat. Biawak itu nangkring di atas dahan setinggi 2 meter dari tanah. Bingung lantaran tak tahu cara menangkap dan mengusir biawak, akhirnya dia menghubungi Damkar BPBD Sidoarjo.

Rescue Regu 1 Damkar Pos Krian langsung turun untuk melakukan evakuasi. Tiba pukul 08.00, petugas berupaya menurunkan biawak lebih dulu. "Petugas membawa peralatan mulai dari sarung tangan ningga tali untuk mengikat biawak," tutur Yoli.

Selepas biawak berhasil turun, kejar-kejaran terjadi antara hewan reptil itu dengan petugas. Hingga akhirnya, sejam kemudian, biawak diamankan oleh petugas *rescue*. "Berhasil ditangkap pukul 09.00 dan langsung diikat, lalu diamankan ke markas," paparnya. (eza/c18/any)

PILKADA 2024

Hari Ini Mulai Buka Pendaftaran PPK

SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mulai hari ini (23/4) membuka pendaftaran panitia pengawas kecamatan (PPK) Pilkada 2024. Pendaftaran berlangsung hingga 29 April 2024.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, kebutuhan PPK di Sidoarjo sebanyak 90 orang. Tiap kecamatan membutuhkan tiga PPK. Pendaftaran berlangsung selama tujuh hari. Namun, jika pendaftar kurang, akan ada perpanjangan sampai 5 Mei. "Untuk syaratnya, bisa cek langsung di *website* KPU," katanya.

Iskak menyebut seluruh persyaratan sama dengan rekrutmen PPK saat Pemilu 2024. Prosesnya juga sama. Pendaftar nanti menjalani verifikasi dan mengikuti *computer assisted test* (CAT). Rencananya, tes dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

Terkait tes kesehatan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Harapannya, tes kesehatan bisa difasilitasi gratis di rumah sakit ataupun puskesmas milik Pemkab Sidoarjo.

Untuk panitia pengawas kecamatan (panwascam), tahun ini tidak ada rekrutmen total. Komisioner Bawaslu Sidoarjo Fathur Rohman mengatakan, petunjuk teknis rekrutmen sudah turun. Prosedurnya,

panwascam untuk pilkada nanti sama dengan panwascam untuk pemilu lalu. Namun, ada evaluasi kinerja. "Tapi, instrumen evaluasinya belum keluar," ujarnya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

PILKADA 2024

Hari Ini Mulai Buka Pendaftaran PPK

SIDOARJO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidoarjo mulai hari ini (23/4) membuka pendaftaran panitia pengawas kecamatan (PPK) Pilkada 2024. Pendaftaran berlangsung hingga 29 April 2024.

Ketua KPU Sidoarjo M. Iskak mengatakan, kebutuhan PPK di Sidoarjo sebanyak 90 orang. Tiap kecamatan membutuhkan tiga PPK. Pendaftaran berlangsung selama tujuh hari. Namun, jika pendaftar kurang, akan ada perpanjangan sampai 5 Mei. "Untuk syaratnya, bisa cek langsung di *website* KPU," katanya.

Iskak menyebut seluruh persyaratan sama dengan rekrutmen PPK saat Pemilu 2024. Prosesnya juga sama. Pendaftar nanti menjalani verifikasi dan mengikuti *computer assisted test* (CAT). Rencananya, tes dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo.

Terkait tes kesehatan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Harapannya, tes kesehatan bisa difasilitasi gratis di rumah sakit ataupun puskesmas milik Pemkab Sidoarjo.

Untuk panitia pengawas kecamatan (paniwascam), tahun ini tidak ada rekrutmen total Komisioner Bawaslu Sidoarjo Esthur

Rohman mengatakan, petunjuk teknis rekrutmen sudah turun. Prosedurnya, panwascam untuk pilkada nanti sama dengan panwascam untuk pemilu lalu. Namun, ada evaluasi kinerja. "Tapi, instrumen evaluasinya belum keluar," ujarnya. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

SIDOARJO DALAM ANGKA

Kejadian DBD di Tiap Puskesmas Januari-April 2024



■ Waru	: 16 kasus	■ Trosobo	: 5 kasus
■ Buduran	: 8 kasus	■ Tulangan	: 5 kasus
■ Sekardangan	: 7 kasus	■ Krian	: 4 kasus
■ Sukodono	: 7 kasus	■ Taman	: 4 kasus
■ Sidodadi	: 7 kasus	■ Tanggulangin	: 4 kasus
■ Urangagung	: 7 kasus	■ Balongbendo	: 3 kasus
■ Sidoarjo	: 5 kasus	■ Ganting	: 3 kasus
■ Barengkrajan	: 5 kasus	■ Sedati	: 3 kasus
■ Candi	: 5 kasus	■ Tambakrejo	: 3 kasus

Sumber: Dinkes Sidoarjo

GRAFIS: RIZKY/JAWA POS

UNTUK Puskesmas Wonokasian, Wonoayu, Tarik, Urangagung 2, Kepadangan, Medaeng, dan Porong, masing-masing terdapat dua kasus DBD. Sedangkan di Puskesmas Jabon, Kedungsolo, Krembung, dan Tarik 2, masing-masing terdapat satu kasus. Untuk kasus meninggal, ada satu orang di Taman. (eza/c7/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Setelah Revitalisasi, PKL Muncul Lagi

SIDOARJO – Trotoar di depan dan samping Gelora Delta yang terlihat rapi setelah direvitalisasi kini mulai berhias lapak pedagang kaki lima (PKL). Padahal, sejak awal mereka tidak boleh lagi berjualan di kawasan tersebut. Kemarin (23/4), misalnya, PKL tampak berjualan di sisi barat trotoar.

Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Hery Santoso mengatakan, area trotoar tersebut mestinya steril dari PKL. Setelah trotoar ditata, mereka sudah tidak boleh berjualan di sana lagi.

Sebagian besar PKL, seperti yang berada di dekat bundaran Taman Pinang Indah (TPI), sudah pindah. Namun, ada sebagian PKL di sisi utara yang nekat buka. "Sudah kami serahkan ke satpol PP untuk sterilisasinya," ujar Hery. Sebab, mereka sudah direlokasi ke tempat lain maupun ke kompleks Gelora Delta. "Sudah disiapkan disporapar (dinas pemuda, olahraga, dan pariwisata)," jelasnya.

Kasi Operasi dan Penindakan Perda Satpol PP Sidoarjo Novianto Koesno mengatakan, area tersebut seharusnya steril dari PKL. "Mohon waktu, pasti kami tindak lanjuti," tandasnya. (uzi/c7/any)



MEMBANDEL: Sejumlah lapak pedagang kaki lima masih tampak di trotoar Gelora Delta kemarin (23/4).

Jawa Pos

Hearing Dengan Komisi A DPRD

Sekda Akui Kesalahan Sudah Bikin Gaduh Mutasi ASN

SIDOARJO - Mutasi ASN Pemkab Sidoarjo yang sudah dilantik dan akhirnya dibatalkan menyebabkan kegaduhan dikalangan ASN. Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan ASN tanggal 22 Maret 2024 lalu sudah dikeluarkan. Dikeluarkannya SK pembatalan itu tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024.

Dalam SE Kemendagri tersebut disebutkan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Komisi A DPRD Sidoarjo mengundang Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati serta Kepala BKD Sidoarjo Budi Basuki serta Asisten Administrasi Umum Atok Irawan dan Kabag Organisasi Arif Mulyono membahas solusi pembatalan pelantikan pejabat tersebut dalam hearing (dengar pendapat). Ketua KPU Sidoarjo serta Ketua Bawaslu Sidoarjo juga diundang oleh Komisi A DPRD Sidoarjo. Selain itu tenaga ahli hukum tata Negara Dr. Rusdianto Sesung SH, MH juga ikut dihadirkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati akhirnya minta maaf atas kesalahan yang dilakukan Pemkab Sidoarjo dalam persoalan pembatalan pelantikan



Pemkab Sidoarjo bersama Komisi A DPRD hearing terkait krsuh pembatalan pelantikan ASN, Senin (22/4/24).

495 pejabat yang menimbulkan kegaduhan dikalangan ASN tentang mutasi itu. Sebab, ada yang sudah syukuran dan sudah serah terima, bahkan sudah menyembelih kambing. Khususnya, di Dinas Pendidikan, yaitu guru-guru yang promosi jadi Kepala Sekolah.

"Saya memang tidak terlalu tahu soal hukum. Jadi saya minta maaf, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan ini dan menghentikan kegaduhan," ucapnya terlihat emosi, dan nada bergetar di tengah forum Rapat Dengar Pendapat atau hearing dengan Komisi A di ruang sidang paripurna DPRD Sidoarjo, Senin (22/4/24) siang.

Pernyataan itu disampaikan Fenny usai dicecar pertanyaan dan pernyataan keras yang diungkapkan Ketua Komisi A DPRD

Sidoarjo, Dhamroni Chudlori serta hampir semua anggotanya yang hadir di forum tersebut. "Jangan berkilah dengan bermacam alasan yang dibuat-buat seperti itu. Cukup minta maaf dan kita akan cari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini," ujar legislator PKB itu.

Kegeraman Komisi A itu muncul setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Budi Basuki berkilah pihaknya tidak pernah menerima Surat Edaran Mendagri yang menentukan batas akhir pelantikan pejabat daerah jelang Pilkada itu. Apalagi keterangan tersebut juga dibenarkan oleh Fenny. Selain itu Sekda juga mengakui adanya kegaduhan diantara pejabat yang terlanjur dilantik itu. "Ada yang sudah potong kambing tapi pelantikannya malah dibatal-

kan," imbuhnya.

Dhamroni pun langsung bereaksi usai mendengar pertanyaan itu. Menurutnya yang seharusnya dipikirkan oleh Sekda dan Kepala BKD saat ini adalah jatuhnya kewibawaan Pemkab Sidoarjo di depan publik. Juga lemahnya kontrol administrasi yang terjadi di internal pihak eksekutif sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi yang pasti akan menimbulkan konsekuensi yang tidak ringan. "Mestinya itu yang dipikirkan, nggak usah ngurus potong kambing segala," tegas Dhamroni.

Bukan hanya itu, Dhamroni juga menyoroti penempatan personel dalam pelantikan itu yang dianggapnya tak memenuhi azas *right man in the right place*. "Masa ada TU sekolah yang senengnya ngajar paduan suara dipindah jadi

kasie pelayanan di Kelurahan? Sebenarnya cara kerjanya BKD itu gimana sih?" sindir politisi asal Tulangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman yang hadir meminta persoalan tersebut segera dikonsultasikan ke Kemendagri. Pasalnya SK pembatalan tersebut terdapat batas akhir berlakunya pembatalan pelantikan tanggal 30 April 2024.

"Saya minta Komisi A dengan bu Sekda dengan jajarannya bersama-sama ke Kemendagri dan hasil dari Kemendagri itu kita patuhi bersama, kita sepakati sekarang hari Senin, kita paling telat Kamis sudah harus ke Kemendagri karena tanggal 30 ini batas akhir pembatalan," pintanya.

Sementara itu tenaga ahli hukum tata Negara Rusdianto Sesung mengatakan keputusan bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan secara hukum sah. Namun secara prosedur cacat. Pasalnya saat melakukan pelantikan tanpa ada surat persetujuan Kemendagri.

Oleh karenanya lanjut Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya itu, pejabat yang dilantik kemarin saat ini masih sah menduduki jabatannya. Namun setelah tanggal 30 April 2024 besok, 491 ASN yang kemarin dilantik kembali ke jabatan semula.

"Posisinya sekarang ini Bu Fenny masih Sekda, Pak Budi masih Kaban sampai tanggal 30 April kecuali jenengan menggugat ke PTUN bisa," ujarnya. ● loe

DUTA

Ketua JCW dan PAKSI : Diduga Ada Jual Beli Jabatan dan Kejanggalan

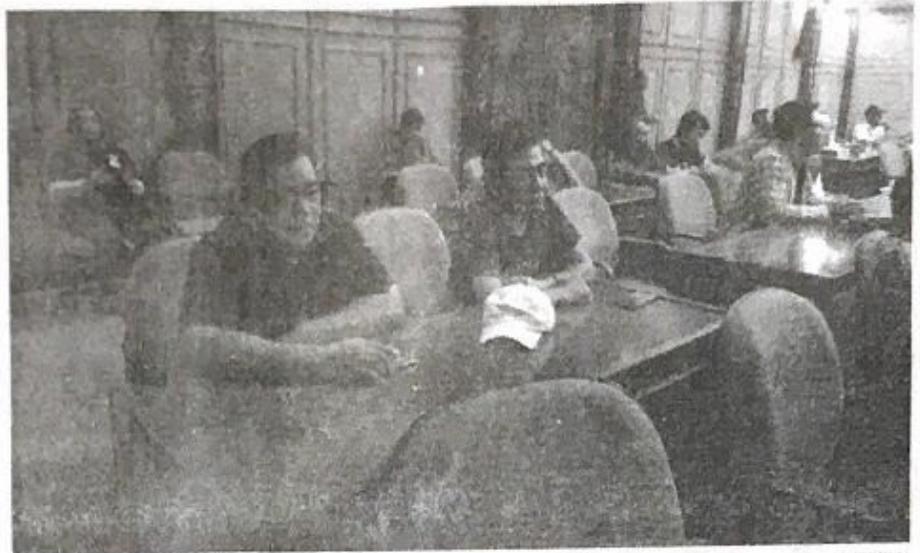
SIDOARJO - Menyikapi mutasi 495 ASN Pemkab Sidoarjo yang sudah dilantik dan akhirnya dibatalkan menyebabkan kegaduhan dikalangan ASN. Atas Surat Keputusan (SK) Bupati Sidoarjo tentang pembatalan pelantikan ASN tanggal 22 Maret 2024 lalu sudah dikeluarkan. Dikeluarkannya SK pembatalan itu tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor : 100.2.1.3/1575/SJ perihal Kewenangan Kepala Daerah pada daerah yang melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian tertanggal 29 Maret 2024. Dua pentolan LSM di Sidoarjo angkat bicara terkait kegaduhan mutasi dan pelantikan dan pembatalannya.

Dalam SE Kemendagri tersebut disebutkan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki, ST mengatakan, dari hasil hearing kemarin, antara Pemkab Sidoarjo yang dihadiri oleh Sekda baru dan Kepala BKD dengan DPRD komisi A ada kejanggalan.

"Saya melihat ada beberapa kejanggalan yang terkesan dipaksakan, seharusnya sebelum dilakukan pelantikan konsultasikan dulu dengan Kementrian Dalam Negeri, bukan setelah pelantikan dan terbit surat pembatalan sampai dua kali, dan yang bikin surat pembatalan harus pejabat yang melantik atau pejabat di atasnya, bukan Sekda, ini terindikasi cacat prosedur dan cacat hukum," terang Sigit.

"Kalau Menteri Dalam Negeri mengabulkan mutasi 495 ASN Sidoarjo, maka Mendagri mengingkari Peraturan yang di sahkan sendiri,



Sigit Imam Basuki hem hitam dan Isdiyanto (Tole)kaos biru, saat menghadiri hearing dengan Komisi A DPRD Sidoarjo.

urusan administrasi, keuangan yang sudah dikedok itu resiko yang harus diterima, apabila nanti pengesahan ditolak Mendagri dan harus kembali seperti semula," terangnya.

Masih kata Sigit menambahkan, terkait mutasi dan pelantikan ASN dilingkungan Pemkab Sidoarjo, kami mencium adanya dugaan jual beli jabatan dalam pelaksanaan mutasi 495 ASN tersebut dan terkesan dipaksakan.

"Karena penyampaian dari Sekda banyak terjadi kegaduhan dilingkungan ASN yang baru saja dilantik, ada yang sudah bancaan (syukuran) sembelih kambing, hal ini menandakan adanya ketakutan pembatalan pelantikan mutasi tersebut," pungkash Sigit.

Terpisah Ketua LSM Pemuda Anti Korupsi (PAKSI) Isdiyanto yang akrab disapa cack Tole mengatakan, mutasi terkesan dipaksakan dan penuh nuansa Nepotisme, terbukti banyak sekali ASN yang tidak sesuai bidang keilmuannya / keahliannya dipaksakan pindah atau naik jabatan asalkan ada kedekatan dengan Bupati ABS (Asal Bapak Senang)," kata Tole,

Selasa (23/4/24).

Lanjut Isdiyanto /Tole, disisi lain BKAD (Badan Kepegawaian Administrasi Daerah) yang selama ini menjadi jantung dalam pelaksanaan pemerintahan malah tidak bisa menjalankan sesuai tugasnya sehingga mulailah muncul kegaduhan itu.

"Kami mencium adanya dugaan jual beli jabatan dalam pelaksanaan mutasi 495 ASN tersebut. LSM Paksi segera membentuk team Investigasi terkait dugaan tersebut. Namun LSM Paksi juga memberikan apresiasi pada Ketua Komisi A dan seluruh anggotanya yang tanggap akan permasalahan mutasi ini dan ikut terjun langsung dalam pelaksanaan penyelesaiannya nanti," pungkash Tole.

"Saya minta Komisi A dengan bu Sekda dengan jajarannya bersama-sama ke Kemendagri dan hasil dari Kemendagri itu kita patuhi bersama, kita sepakati sekarang hari Senin, kita paling telat Kamis sudah harus ke Kemendagri karena tanggal 30 ini batas akhir pembatalan," pintanya. ● Loe



POLITIK

Elektabilitas Semakin Kuat, Abah Usman Siap Daftar Bupati Nomer Wahid



Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- H.Usman M.Kes (Abah Usman) ketua DPRD Sidoarjo memastikan siap menjadi orang pertama atau nomor wahid, yang mendaftarkan diri maju sebagai calon bupati Sidoarjo di DPC PKB Sidoarjo.



Liputan Sidoarjo.com

Tinggal menunggu Desk Pilkada DPC PKB Sidoarjo secara resmi membuka pendaftaran, maka dirinya secara resmi juga mendaftarkan diri.

“Kita tunggu desk Pilkada Sidoarjo mengumumkan pendaftaran, maka hari pertama itu saya akan mendaftar,” tutur Abah Usman

Saat ini lanjut Abah Usman, dirinya terus melakukan sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat, sebagai ikhtiar untuk semakin menguatkan elektabilitas.

Selain itu, Abah Usman juga masif bersilatuhrahmi dengan para ulama, kyai, tokoh agama serta berkomunikasi para elit partai politik.

Tentu saja, agar elektabilitas yang sudah cukup kuat saat ini, semakin kuat dan masyarakat Sidoarjo semakin bulat mendukung keberaniannya maju dalam Pilkada Sidoarjo mendatang.

“Yang jelas kami sudah siap 100 persen maju di Pilkada Sidoarjo. Sekarang ini, kami perlu terus mensosialisasikan diri ke masyarakat agar elektabilitas bisa naik. Sebagai kader PKB, saya siap mencalonkan diri dari PKB,” ujarnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pada kesempatan ini, Abah Usman juga menyinggung kesepakatan di internal PKB Sidoarjo, bahwa siapa pun yang mendapatkan rekomendasi dari DPP PKB untuk maju dalam Pilkada Sidoarjo, maka semua kader PKB harus tegak lurus dan harus siap legowo mendukung.

“Siapa pun nanti yang direkomendasi pusat (DPP PKB), maka kita semua sebagai kader harus tegak lurus dan harus siap untuk legowo,” jelasnya.

Sementara itu ketua desk Pilkada PKB Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan PKB Sidoarjo masih menyiapkan diri untuk membuka pendaftaran calon kepala daerah.

“Kita masih menggodok persyaratannya,” terang Nasih. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



PENEGAKAN HUKUM

Lawan KPK, Muhdlor Resmi Ajukan Pra Peradilan Di PN Jaksel



Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, resmi mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024) kemarin.



Liputan Sidoarjo.com

Gugatan ini dilayangkan lantaran Gus Muhdlor tidak terima ditetapkan tersangka dugaan korupsi pemotongan dan penerimaan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo oleh Komisi Antirasuah itu.

“Sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian klasifikasi perkara gugatan Gus Muhdlor yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Senin malam seperti termuat di kompas.

Gugatan Bupati Sidoarjo ini teregister di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. PN Jakarta Selatan bakal mulai sidang perdana untuk memeriksa dan mengadili gugatan Gus Muhdlor melawan KPK pada Senin 6 Mei 2024 mendatang.

Seperti diketahui, KPK akhirnya menetapkan Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor Ali atua Gus Muhdlor sebagai tersangka korupsi.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KPK menduga Gus Muhdlor memotong dan menerima uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo.

“Kami mengkonfirmasi atas pertanyaan media bahwa betul yang bersangkutan menjabat bupati di Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai dengan sekarang,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri saat, Selasa (16/4/2024) lalu. (Abidin)

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gelar Hearing Temuan BPK Soal Dagulir Macet, Komisi B Banyak Temukan Kejanggalan

Admin — 23/04/2024

Share

 Read Time: 2 Minute, 52 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-
Komisi B DPRD Sidoarjo berusaha keras
mengurai persoalan macetnya Dana Bergulir di
beberapa dinas terkait, yang menjadi temuan
Badan Pemeriksa Keuangan.

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)



Pelaksanaan hearing

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Upaya yang dilakukan komisi B, dengan mengundang empat Dinas yang mendapatkan anggaran Dagulir antara tahun 2010-2020, pada hearing di ruang pertemuan komisi, Selasa (23/4/2024) sore.

Hadir tiga kepala Dinas dan satu Kabid terkait yang hadir langsung, yakni Kepala Dinas PMD Drs. MULYAWAN, S.Ip, MM, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Dr Eni Rustianingsih ST MT, Kepala Dinas Koperasi M. Edi Kurniadi ST.MM, serta Kabid Disperindag Listyaningsih.

Selain itu hadir juga Kepala Bank Jatim Sidoarjo Deddy Adji Wijaya SE.MM.

Banyak temuan terungkap dari hearing ini, yang menjadi akar masalah dana bergulir senilai milyaran rupiah itu macet.

Seperti temuan adanya domisili rumah kontrak dari debitur (penghutang), yang digunakan saat mengajukan pinjaman dana bergulir.

Liputan Sidoarjo.com

Bahkan ada juga debitur yang mengaku tidak menerima sepeserpun uang dari Dagulir, padahal dia lah yang menandatangani kontrak pinjaman tersebut.

Tentu saja temuan-temuan ini membuat komisi B gusar.

“Debitur yang menerima pinjaman sistem Chanelling saja banyak yang fiktif, apalagi yang non Chanelling. Ini bisa masuk pidana,” tutur Bambang Pujiyanto ketua komisi B DPRD Sidoarjo yang memimpin hearing.

Dari pengakuan Beberapa Kepala dinas koperasi dan kepala dinas PMD, bahwa dokumen kontrak antara debitur dengan dinas memang banyak yang hilang.

“Sehingga ketika kita melakukan penagihan cukup sulit. Kemungkinan dokumen kontrak hilang ini saat ada renovasi gedung Dinkop tahun 2017,” ujar Edi Kadinkop.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Dari data yang nilai dana yang macet ternyata lumayan besar mencari angka Rp 10 miliar lebih.

Selain dana bergulir, ada juga dana macet masuk dalam piutang di Dinas-dinas ini yang disebut Channeling.

Chanelling sendiri adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

Dari data yang ada, Dagulir Chanelling yang masuk data piutang di Dinas koperasi sebesar 8,4 miliar ditahun tahun 2022, dan sedikit turun ditahun 2023 sebesar Rp 8,2 miliar.

Tidak hanya di dinas koperasi, pada Dinas Pangan Dana bergulir yang masuk piutang sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2022, dan sedikit turun di tahun 2023 sebesar Rp 2.03, miliar.

Liputan Sidoarjo.com

Pada hearing ini, komisi B mendapatkan dokumen panitia Dagulir beberapa dinas di tahun 2010-2013.

Dinas Pangan waktu itu Kepala Dinasnya Dra Wuwuh Setyani MSi, Dinas PMK masa jabatan Ali Imron, dan Diskoperindag tahun 2013 yang waktu itu kepala dinasnya Fenny Apridawati.

“Akan kita pelajari seluruh dokumen yang kita terima hari ini, karena bagaimanapun juga, ada uang negara yang harus kita selamatkan di Dagulir macet ini,” ujar Bambang Pujiyanto.

Sementara itu, Deddy Adjie Wijaya SE.MM Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo yang juga hadir dalam hearing, memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pihaknya dalam upaya menagih debitur yang macet.

Baik melalui penagihan via call des dan, surat peringatan bahkan turun langsung mencari alamat debitur yang macet.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pada kesempatan ini, Deddy juga memberikan masukan agar ada upaya pengadilan atau langkah lelang agunan debitur 'nakal', dengan terlebih dulu diberikan surat peringatan tiga kali agar segera melunasi tanggungannya.

“Dengan langkah ini, maka tanggungan debitur akan bisa terbayarkan, dan kredit dana bergulir ini secara bertahap bisa tuntas,” ujar Deddy.

Komisi B yang hadir pada hearing ini diantaranya Bambang Pujiyanto (ketua), Sudjalil (Wk ketua) Arief Bachtiar (sekretaris), Iswahyudi serta Agil Effendi (anggota)

Hearing kembali akan dijadwalkan di lain waktu, dengan kemungkinan memanggil mantan kepala dinas terkait yang mengetahui soal dana bergulir ini. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



RAGAM PERISTIWA

Aksi Di Depan Gedung KPK, Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo Minta GM Segera Ditahan

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo, Selasa (23/4/2024) menggelar aksi unjuk rasa, didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.



[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)

Mereka datang sambil membawa spanduk dan poster, untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo.

Mereka juga mendesak KPK segera menangkap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Puluhan orang dari Koalisi Masyarakat Sipil Sidoarjo (KMSS) ini, didampingi Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia (BBHDI) saat melakukan aksi unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

Beberapa tuntutan yang mereka suarakan diantaranya agar KPK segera melakukan penahanan terhadap Bupati SDA (Gus Mudlor) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

[Liputan Sidoarjo.com](http://LiputanSidoarjo.com)



Menyerahkan Surat Permohonan Pemeriksaan
Oleh KPK terhadap RSUD Sidoarjo barat, yang
diduga terindikasi melakukan Obstruction Of
Justice sehingga GM Tidak hadir dalam
pemeriksaan KPK Pada Jumat 19 April 2024.
(Abidin)

Liputan Sidoarjo.com



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Usman Pastikan Daftar Cabup PKB Bersaing dengan Subandi, Bagaimana dengan Mbak Anik?

“Insyaallah pendaftaran akan dibuka dalam minggu ini. Sekarang masih persiapan rapat-rapat dan koordinasi dulu dengan DPW dan DPP,” kata Abdillah Nasih, Sekretaris DPC PKB Sidoarjo.

🕒 Apr 23, 2024 - 14:09





Abah Usman, Ketua DPRD memastikan daftar Cabup PKB, sedangkan Anik Maslachah masih terkesan 'wait and see'.

NUSADAILY.COM – SIDOARJO; Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Usman M. Kes, semakin memantapkan langkahnya untuk 'running' Pilkada 2024. Bahkan begitu desk Pilkada PKB Sidoarjo dibuka, dia memastikan sebagai orang pertama mendaftar untuk mengikuti proses penjurangan sebagai calon bupati (cabup) yang diusung partainya pada pesta demokrasi memilih bupati dan wakil bupati Sidoarjo pada Nopember mendatang.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Berdasarkan kebijakan DPP PKB sebagai langkah awal menyongsong Pilkada serentak 2024, telah membuka pendaftaran calon kepala daerah, mulai gubernur/wakil gubernur maupun walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati se-Indonesia.

Pendaftaran sebagai proses penjaringan calon kepala daerah ini mulai dibuka pada 20 April 2024,--bisa langsung daftar ke kantor DPW dan DPC PKB di seluruh Indonesia atau melalui website sicakada.pkb.id.

Untuk wilayah Sidoarjo sendiri, Abdillah Nasih, Sekretaris DPC PKB Sidoarjo mengatakan saat ini pihaknya sudah membentuk kerangka desk pilkada sebagai wadah penjaringan cabup dan cawabup.

“Insyaallah pendaftaran akan dibuka dalam minggu ini. Sekarang masih persiapan rapat-rapat dan koordinasi dulu dengan DPW dan DPP,” kata Nasih, pada Selasa (23/4/2024) siang tadi.





Sementara itu, Abah Usman, sapaan ketua DPRD Sidoarjo mengaku tekadnya semakin bulat untuk terus maju sebagai cabup pada Pilkada 2024, melalui PKB. Ini merupakan langkah dan keputusan politik yang harus diambil agar bisa berperan lebih besar dalam membangun Sidoarjo ke depannya. “Saya tetap maju dalam Pilkada 2024. Begitu desk pilkada PKB dibuka, saya akan mendaftar di hari itu juga, dan mungkin sebagai orang pertama yang mendaftarkan diri sebagai cabup,” tegasnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Salah satu reklame berukuran besar bergambar Usman M.Kes di kawasan Candi, sebagai bentuk sosialisasi meningkatkan elektabilitas pada Pilkada 2024.

Saat ini berbagai langkah strategis terus dilakukan Abah Usman. Selain kian getol melakukan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan elektabilitas, juga pendekatan ke struktural partai maupun kultural, terutama dengan para ulama dan tokoh serta akar rumput kaum nahdliyin Sidoarjo yang notabene merupakan basis terbesar kekuatan massa PKB di Sidoarjo.





Usman merupakan salah satu kader terbaik yang berangkat dari basis kultural (NU). Dia pernah menjabat ketua ranting (tingkat desa), lalu PAC (tingkat kecamatan), dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I DPC PKB Sidoarjo. Sehingga dia tidak pernah mengalami kesulitan menjalin komunikasi sesama fungsionaris maupun kader partai.

Termasuk pula dengan para elit partai mulai DPW PKB Jatim maupun DPP PKB. Apalagi Abah Usman sejauh ini telah membuktikan dedikasi dan loyalitasnya terhadap partai dibawah garis lurus kepemimpinan Muhaimin Iskandar.

Sebagai sesama orang nahdliyin 'tulen', Abah Usman dikenal bersikap 'humble' dan komunikatif dengan siapa pun ini mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh NU di Sidoarjo, termasuk para ulama di jajaran kepengurusan PC NU Sidoarjo maupun kalangan kiai kampung di Sidoarjo.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sehingga wajar tingkat elektabilitas Abah Usman, saat ini cenderung meningkat seiring dengan mengalirnya dukungan dari struktural maupun kultural. Termasuk kalangan pondok pesantren di Sidoarjo. Bahkan ‘bandul politik’ Bumi Sholawat sebagai representasi kekuatan arus bawah kaum nahdliyin yang mendominasi perpolitikan di Sidoarjo, diperkirakan bakal mendukung langkah politik Abah Usman.

Lalu bagaimana dengan status tersangka Gus Muhdlor yang juga sebagai simbol kekuatan politik Bumi Sholamat? Abah Usman mengaku masalah itu tidak terkait dengan keputusan running ke Pilkada 2024. “Setiap kejadian pasti ada hikmah yang bisa diambil. Ini sekaligus menjadi pembelajaran kita semua agar dapat membangun Sidoarjo lebih baik ke depannya,” tuturnya.





Untuk mendongkrak elektabilitas dan akseptabilitas, Abah Usman juga mengaku telah mengaktifkan kembali relawan yang ikut memenangkan dirinya pada Pileg 2024. Kemudian ada juga komunitas dan ormas yang secara aktif mensosialisasikan dirinya ke masyarakat. “Dengan segala daya dan upaya saya siap bersaing dengan kader lainnya. Dan siapapun yang mendapat rekom dari DPP PKB untuk maju dalam Pilkada, kita akan tegak lurus untuk saling mendukung,” tegasnya.

Untuk mendapatkan rekom dari DPP PKB sebagai syarat maju sebagai cabup pada Pilkada 2024, Abah Usman dipastikan akan bersaing dengan Subandi, Wakil Bupati yang merangkap sebagai ketua DPC PKB Sidoarjo. Selain itu tidak menutup kemungkinan muncul kader lainnya, seperti Achmad Amir Aslichin maupun Anik Maslachah.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Mas In,--sapaan putra Bupati Saiful Illah itu merupakan politikus PKB yan sekarang duduk di DPRD Jatim. Sedangkan Mbak Anik,--sapaan wakil ketua DPRD Jatim yang juga merangkap sebagai sekretaris DPW PKB Jatim. Jika mengukur popularitas maupun elektabilitas, Mbak Anik relatif lebih moncer dibanding kader lainnya.

Perbandingannya pada hasil Pileg 2024. Mbak Anik berstatus caleg PKB berada di dapil Sidoarjo untuk DPRD Jatim, telah mendulang sekitar 120 ribu suara. Sebagai kader yang juga berangkat dari kultural, dia mempunyai kedekatan dengan kaum nahdliyin, khususnya kalangan fatayat dan muslimat NU Sidoarjo. Juga para tokoh dan kiai NU di Sidoarjo.





Hanya saja, apakah Mbak Anik benar-benar tidak berminat maju sebagai Cabup dari PKB dalam Pilkada Sidoarjo 2024,--seperti statement yang pernah dilontarkan di beberapa media? Atau bisa saja 'Srikandi' dari Bumi Delta ini masih perlu 'wait and see' untuk menentukan langkah politik ke depannya terkait Pilkada 2024. Saat ini masih menjadi misteri tersendiri. (*/ful)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Respon Temuan BPK, Komisi B DPRD Sidoarjo Gelar Hearing Kasus Dagulir



by ZonaJatim00 — 23 April 2024



0

SHARES



Zonajatim.com, Sidoarjo – Macetnya miliar rupiah Dana Bergulir (Dagulir) di beberapa OPD Pemkab Sidoarjo

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo mendapat respon Komisi B DPRD



mendapat respon Komisi B DPRD Sidoarjo. Komisi yang membidangi keuangan itu berusaha keras mencari solusi persoalan macetnya Dana Bergulir di sejumlah OPD yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Guna kepentingan itu, komisi B mengundang empat Dinas yang mendapatkan anggaran Dagulir antara tahun 2010-2020, pada hearing di ruang pertemuan komisi, Selasa (23/4/2024).

Hadir tiga kepala Dinas dan satu Kabid terkait yang hadir langsung, yakni Kepala Dinas PMD Drs. Mulyawan, S.Ip, MM, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Dr Eni Rustianingsih ST MT, Kepala Dinas Koperasi M. Edi Kurniadi ST.MM, serta Kabid Disperindag Listyaningsih. Hadir juga Kepala Bank Jatim Sidoarjo Deddy Adji Wijaya SE.MM.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kepala OPD yang ikut hearing

Banyak temuan terungkap dari hearing ini, yang menjadi akar masalah dana bergulir senilai milyaran rupiah itu macet. Seperti temuan adanya domisili rumah kontrak dari debitur (penghutang), yang digunakan saat mengajukan pinjaman dana bergulir.

Bahkan ada juga debitur yang mengaku tidak menerima sepeserpun uang dari Dagulir, padahal dia lah yang

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo menandatangani kontrak pinjaman

Dari temuan-temuan ini membuat komisi B gusar. “Debitur yang menerima pinjaman sistem Chanelling saja banyak yang fiktif, apalagi yang non Chanelling. Ini bisa masuk pidana,” tutur Bambang Pujiyanto ketua komisi B DPRD Sidoarjo yang memimpin hearing.

Dari pengakuan Kepala dinas koperasi dan kepala dinas PMD, bahwa dokumen kontrak antara debitur dengan dinas memang banyak yang hilang. “Sehingga ketika kita melakukan penagihan cukup sulit. Kemungkinan dokumen kontrak hilang ini saat ada renovasi gedung Dinkop tahun 2017,” ujar Kadinkop Edi Kurniadi.

Dari data yang nilai dana yang macet ternyata lumayan besar mencari angka Rp 10 miliar lebih.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Selain dana bergulir, ada juga dana macet masuk dalam piutang di Dinas-dinas ini yang disebut Channeling.

Chanelling sendiri adalah pola penyaluran dana oleh pemerintah kepada masyarakat melalui perbankan atau lembaga pembiayaan non perbankan dimana pemerintah menanggung risiko kerugian apabila terjadi kemacetan.

Dari data yang ada, Dagulir Chanelling yang masuk data piutang di Dinas koperasi sebesar 8,4 miliar ditahun tahun 2022, dan sedikit turun ditahun 2023 sebesar Rp 8,2 miliar. Tidak hanya di dinas koperasi, pada Dinas Pangan Dana bergulir yang masuk piutang sebesar Rp 2,5 miliar pada tahun 2022, dan sedikit turun di tahun 2023 sebesar Rp 2.03, miliar.

Zonajatim.com

Pada hearing ini, komisi B mendapatkan dokumen panitia Dagulir beberapa dinas di tahun 2010-2013. Dinas Pangan waktu itu Kepala Dinasnya Dra Wuwuh Setyani MSi, Dinas PMK masa jabatan Ali Imron, dan Diskoperindag tahun 2013 yang waktu itu kepala dinasnya Fenny Apridawati. "Akan kita pelajari seluruh dokumen yang kita terima hari ini, karena bagaimanapun juga, ada uang negara yang harus kita selamatkan di Dagulir macet ini," ujar Bambang Pujiyanto.

Sementara itu, Deddy Adjie Wijaya SE.MM Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo yang juga hadir dalam hearing, memaparkan langkah-langkah yang sudah dilakukan pihaknya dalam upaya menagih debitur yang macet.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo Deddy Adjie Wijaya saat
beri keterangan

Baik melalui penagihan via call des dan,
surat peringatan bahkan turun langsung
mencari alamat debitur yang macet.

“Disitulah banyak temuan yang kami
dapatkan, diantaranya debitur dengan
alamat rumah kontrak, dan debitur yang
tidak merasa menerima uang Dagulir,”
jelasnya.

Zonajatim.com

Pada kesempatan ini, Deddy juga memberikan masukan agar ada upaya pengadilan atau langkah lelang agunan debitur 'nakal', dengan terlebih dulu diberikan surat peringatan tiga kali agar segera melunasi tanggungannya. "Dengan langkah ini, maka tanggungan debitur akan bisa terbayarkan, dan kredit dana bergulir ini secara bertahap bisa tuntas," ujar Deddy.

Komisi B yang hadir pada hearing ini diantaranya Bambang Pujiyanto (ketua), Sudjalil (Wk ketua) Arief Bachtiar (sekretaris) , Iswahyudi serta Agil Effendi (anggota)"Karena data belum lengkap, kami akan agendakan hearing kembali, dengan kemungkinan memanggil mantan kepala dinas terkait yang mengetahui soal dana bergulir ini," ujar Bambang Pujiyanto.

Zn



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Berita dnnmedia

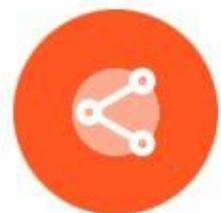
Macet Rp 13 Miliar Lebih, Komisi B Endus Aroma Penyelewengan Dagulir APBD Sidoarjo

Rio 

Tuesday, April 23, 2024, April 23, 2024 WIB



Suasana hearing Komisi B DPRD Sidoarjo yang membahas tentang Dana Bergulir yang macet selama lebih dari 14 tahun.



DNN, SIDOARJO – Komisi B DPRD

Sidoarjo curiga adanya penyelewengan dalam penyaluran Dana Bergulir (Dagulir) senilai puluhan Miliar rupiah yang dikucurkan sejak 2010 lalu melalui beberapa Dinas di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Dugaan tersebut muncul setelah Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo, Deddy Aji Wijaya mengungkap fakta tentang adanya kasus ‘pinjam nama’ dalam program yang dibiayai APBD Sidoarjo tersebut di forum hearing atau Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi B, Selasa (23/04/2024) siang tadi.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Disebutkannya, dari Rp 15 Miliar dana yang disalurkan Bank Jatim cabang Sidoarjo pada sekitar 1.700 debitur, Rp 10,8 Miliar diantaranya macet hingga saat ini. “Harusnya masa kreditnya hanya 3 tahun. Namun sampai 14 tahun ini belum tertagih,” tandasnya.

Pihaknya sendiri sudah berusaha melakukan penagihan melalui berbagai macam cara. Mulai dari menghubungi kreditur melalui telepon, surat tagihan yang dikirim secara rutin dan berkala hingga melakukan kunjungan.



“Dari beberapa debitur yang kami kunjungi, ada yang terang-terangan menolak melakukan pembayaran karena mereka mengaku hanya menandatangani surat akad kredit dan mengambil uang tersebut tapi sama sekali tak menggunakannya,” ujarnya.

Namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang memakai soft loan berbunga 3% per tahun tersebut. Deddy mengatakan pihak bagian penagihan Bank Jatim memang tidak menanyakan perihal tersebut karena sudah diluar batas kewenangannya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Bahkan jika mengacu pada surat petunjuk teknis dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Mineral Sidoarjo yang ditandatangani kepala dinasnya, Bu Fenny Apridawati di tahun 2013 lalu, tugas kami hanya mengecek perlengkapan persyaratan dan mencairkan dana itu,” tandasnya.



Meski begitu pihak Bank Jatim Sidoarjo tetap punya komitmen moral untuk melakukan penagihan pada kreditur macet tersebut. “Ini semata-mata karena dana itu merupakan uang Negara yang seharusnya bisa disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan,” katanya lagi.

Karena itu di forum tersebut Deddy mengusulkan untuk menerapkan metode penagihan yang biasa dilakukan pihak perbankan. Yakni melalui sita dan lelang jaminan. Sedangkan yang tanpa agunan menggunakan metode gugatan sederhana ke pengadilan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Home > Berita dnnmedia

Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kades, PMD Sidoarjo Tunggu Instruksi Mendagri

Rio 

Tuesday, April 23, 2024, April 23, 2024 WIB

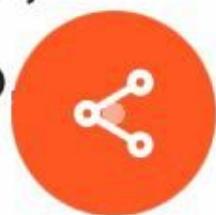


Mulyawan (baju batik), Kepala Dinas PMD Sidoarjo.



DNN, SIDOARJO – Hingga saat ini Pemkab Sidoarjo, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) belum mendapatkan kejelasan tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) baru tentang Pemerintahan Desa yang salah satunya memutuskan tambahan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Hal ini lantaran UU baru yang memperbaharui UU nomor 6 tahun 2014 tersebut belum dicatatkan dalam lembaran Negara atau diregister. “Ya ini masalahnya. Padahal sekarang ini masanya sudah sangat mendesak,” keluh Kepala Dinas PMD Sidoarjo Mulyawan.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

la yang ditemui usai mengikuti hearing atau rapat dengar pendapat dengan Komisi B di ruang sidang DPRD Sidoarjo, Selasa (23/04/2024) sore tadi itu mengatakan pada 9 Mei mendatang ada kades-kades di beberapa desa yang sudah habis masa jabatannya.

“Memang sempat ada perintah dari Kemendagri (Kementerian Dalam negeri-red) untuk tidak menempatkan PJ (penjabat-red) di desa-desa yang masa jabatan kadesnya berakhir di bulan Pebruari hingga April. Terus yang Mei ini bagaimana?,” katanya.



Untuk mendapatkan kejelasan itu, pihaknya sudah berkirim surat untuk mendapatkan petunjuk dari Kemendagri terkait hal itu agar tidak salah melangkah. “Sudah kita kirim suratnya, soalnya memang sudah emergency,” imbuh birokrat senior itu.

Meski begitu pihaknya tetap akan menyiapkan personel untuk mengisi posisi sebagai PJ untuk kades-kades yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan sebagainya. “Sedangkan yang habis masa jabatan, kita tunggu keputusan dari Kemendagri. Kami nggak mau menggunakan persepsi sendiri,” tandas Mulyawan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Sedangkan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo rencananya akan digelar pada tahun depan. Hanya saja tanggal dan bulannya masih belum ditetapkan hingga saat ini.

**Dengan adanya aturan baru tentang rentang waktu masa jabatan kades tersebut, bakal ada 74 desa di kota delta yang akan melaksanakan Pilkades Serentak 2025. “Tapi kepastiannya masih menunggu terbitnya UU baru tentang desa itu,” pungkas Mulyawan.
(pram/sein)**

